



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II**



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 (*Audited*)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (*Audited*)

*Jalan TMP. Taruna, Sukaasih
Kota Tangerang 15111
Banten*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Tangerang II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang II, 12 Mei 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Diki Zenal Abidin

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II

Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Tangerang 15111
Telepon : (021) 55771197, 55771198; Surel: kpknltangerang2@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan *Audited* tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang II, 12 Mei 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Diki Zenal Abidin

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp28,117,835,604 atau mencapai 165 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp17,061,702,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3,077,896,978 atau mencapai 93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.322,134,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp9,472,463,009 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2,259,135,848, Aset Tetap (neto) sebesar Rp7,213,327,161, dan aset lainnya Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2,110,300,944 dan Rp7,362,162,065.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,650,533,661, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3,450,231,381, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp24,200,302,280. Terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp48,937,496, dengan rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4,068,996 dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp47,699,000, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2,830,500, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp24,249,239,776.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp7,876,881,691 ditambah Surplus-LO sebesar Rp24,249,239,776 serta Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp2,830,500, dikurangi transaksi antar entitas senilai (Rp24,766,789,902), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp7,362,162,065.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL TANGERANG II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2023		% terhadap anggaran	TA 2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	17,061,702,000	28,117,835,604	165	28,972,837,307
JUMLAH PENDAPATAN		17,061,702,000	28,117,835,604		28,972,837,307
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
BELANJA BARANG	B.3	2,722,320,000	2,488,194,308	93	2,210,460,886
JUMLAH BELANJA OPERASI		2,722,320,000	2,488,194,308	93	2,210,460,886
BELANJA MODAL					
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	B.4	37,219,000	37,000,000	99	0
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	B.5	562,595,000	552,702,670	98	0
JUMLAH BELANJA MODAL		599,814,000	589.702.670	98	0
JUMLAH BELANJA		3,322,134,000	3,077,896,978	93	2,210,460,886

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPKNL TANGERANG II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	27,650,533,661	29,579,058,419
JUMLAH PENDAPATAN		27,650,533,661	29,579,058,419
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	60,230,999	61,250,841
Beban Barang dan Jasa	D.3	1,745,449,490	1,663,322,161
Beban Pemeliharaan	D.4	270,073,107	287,673,338
Beban Perjalanan Dinas	D.5	429,519,431	231,943,337
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	944,958,354	360,819,278
JUMLAH BEBAN		3,450,231,381	2,605,008,955
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		24,200,302,280	26,974,049,464
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.7		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.068.996	7,098,888
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(2,830,500)	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		47,699,000	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	48,937,496	7,098,888
POS LUAR BIASA			
Beban luar biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		24,249,239,776	26,981,148,352

II. NERACA

KPKNL TANGERANG II NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	C.1	1,691,513	0
KAS LAINNYA SETARA KAS	C.2	2,095,027,964	3,850,485,326
PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	C.3	148,395,540	613,320,000
PERSEDIAAN	C.4	14,020,831	31,289,000
JUMLAH ASET LANCAR		2,259,135,848	4,495,094,326
ASET TETAP			
TANAH	C.5	1,650,781,000	1,650,781,000
PERALATAN DAN MESIN	C.6	5,054,421,826	4,692,054,844
GEDUNG DAN BANGUNAN	C.7	6,585,455,770	6,032,753,100
ASET TETAP LAINNYA	C.8	33,200,000	8,800,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.9	(6,110,531,435)	(5,136,653,823)
JUMLAH ASET TETAP		7,213,327,161	7,247,735,121
ASET LAINNYA			
ASET LAIN-LAIN	C.10	11,117,500	23,552,500
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI		(11,117,500)	(23,552,500)
ASET LAINNYA	C.11	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		9,472,463,009	11,742,829,447
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
UTANG PADA PIHAK KETIGA	C.12	2,110,300,944	3,865,947,756
JUMLAH KEWAJIBAN		2,110,300,944	3,865,947,756
EKUITAS			
EKUITAS	C.13	7,362,162,065	7,876,881,691
JUMLAH EKUITAS		7,362,162,065	7,876,881,691
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9,472,463,009	11,742,829,447

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL TANGERANG II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
Ekuitas Awal	E.1	7,876,881,691	7,544,351,635
Surplus/Defisit LO	E.2	24,249,239,776	26,981,148,352
Koreksi nilai tahun berjalan	E.3	2,830,500	0
Transaksi antar entitas	E.4	(24,766,789,902)	(26,648,618,296)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(514,719,626)	332,530,056
Ekuitas Akhir	E.5	7,362,162,065	7,876,881,691

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realitis per tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Adapun rencana strategis tersebut adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib administrasi urusan kepegawaian dan keuangan.

2. Mewujudkan tertib administrasi urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan;
4. Melaksanakan Inventarisasi dan penilaian BMN sesuai target secara berkesinambungan;
5. *Collecting* data kekayaan negara;
6. Meningkatkan penyelesaian Piutang Negara;
7. Melakukan penataan sistem administrasi dalam pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Meningkatkan citra lelang yang mampu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa lelang;
9. Menyempurnakan sistem administrasi dan informasi dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, serta penanganan masalah hukum;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Tangerang II. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang saat ini menjadi SAKTI Modul GLP dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang saat ini menjadi SAKTI Modul BMN. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Tangerang II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Tangerang II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca di kalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp28,117,835,604

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28,117,835,604 atau 165% dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17,061,702,000 setelah dikurangi total pengembalian sebesar Rp37,553,580 yang terdiri atas kelebihan setoran Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp33,953,580 dan Biad PN sebesar Rp3,600,000. Pendapatan di lingkup KPKNL Tangerang II berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan dari Bea Lelang oleh KPKNL Tangerang II, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Jasa Giro, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pemindahtanganan BMN Lainnya.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Negara
Rp3,077,896,978

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp3,077,896,978 atau 93% dari anggaran belanja sebesar Rp3,322,134,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	2.722.320.000	2.488.194.308	91,40%
Belanja Modal	599.814.000	589.702.670	98,31%
Total Belanja	3.322.134.000	3.077.896.978	92,65%

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	% Real. Angg.
Belanja Barang	2.488.194.308	2.210.460.886	112,56%
Belanja Modal	589.702.670	-	100,00%
Total Belanja	3.077.896.978	2.210.460.886	139,24%

Secara garis besar pada TA 2023 terjadi kenaikan belanja sekitar 39,24% dibandingkan dengan periode TA 2022. Hal ini terjadi karena terdapat kenaikan pada belanja barang serta terdapat belanja modal pada TA 2023 yang sebelumnya tidak terdapat pada TA 2022.

*Belanja Barang
Rp2,488,194,308*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2023 sebesar Rp2,488,194,308 atau mengalami kenaikan sebesar 12,56% dibandingkan periode yang sama pada TA 2022, yaitu sebesar Rp2,210,460,886.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp37,000,000*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 adalah sebesar Rp37,000,000 sekitar 99% dari pagu sebesar Rp37,219,000 Belanja Modal Peralatan dan mesin untuk TA 2023 terdiri dari pengadaan AC 2,5 PK Cassette sebanyak 2 unit dan AC Split 1,5 PK sebanyak 1 unit

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp552,702,670*

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 adalah sebesar Rp552,702,670 yaitu sekitar 98% dari anggaran sebesar Rp562,595,000. Belanja Modal Konstruksi ini adalah berupa Renovasi Rumah Negara sebanyak 1 unit seluas 135 meter persegi yang berada di Jl. Mahoni I, RT.002/RW.016, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp1,691,513*

C.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,691,513 dan Rp0. Rincian saldo sebesar Rp1,691,513 merupakan PPN atas kegiatan lelang yang belum disetorkan kepada negara.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2,095,027,964*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2,095,027,964 dan Rp3,850,485,326.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum diserahkan kepada pihak ketiga berupa saldo rekening di bank. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2023
Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	21,816,098
Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	2,072,096,666
Lain-lain Lelang	(25,000)
Jumlah	2,095,027,964

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp148,395,540*

C.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp148,395,540 dan Rp613,320,000. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak negara yang masih harus diterima namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masih belum diterima. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Bea Lelang Penjual dan Pembeli yang telah dilunasi pada tanggal 3 dan 5 Januari 2024.

*Persediaan
Rp14,020,831*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14,020,831 dan Rp31,289,000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional.

Tanah

Rp1.650.781.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Tangerang II per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1,650,781,000. Adapun rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No	Jenis	KIB	Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2010101004	943 m2	1,038,348,000
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2010101004	300m2	612,433,000
Jumlah				1,650,781,000

Peralatan dan

Mesin

Rp5,054,421,826

C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,054,421,826 dan Rp4,692,054,844.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa: Penambahan AC Casette sebanyak 2 unit dan AC Split sebanyak 1 unit.

Gedung dan

Bangunan

Rp6,585,455,770

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di lingkup KPKNL Tangerang II per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6,585,455,770 dan Rp6,032,753,100.

Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	KIB	Jml Unit	Nilai
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	1	Rp 5.488.040.000
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	4010104999	1	Rp 65.813.000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	4010133001	2	Rp 41.163.100
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	4010201007	1	Rp 182.806.000
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4010201010	1	Rp 130.576.000
Rumah Negara dalam proses penggolongan B	4010134002	1	Rp 637.128.670
Rumah Negara dalam proses penggolongan C	4040104003	1	Rp 39.929.000
Jumlah			Rp 6.585.455.770

Aset Tetap Lainnya
Rp33,200,000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp33,200,000 dan 8,800,000. Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	KIB	Jml Unit	Nilai
Buku Lainnya	6010101999	1	Rp 4.400.000
Bahan Kartografi Lainnya	6010101999	40	Rp 4.400.000
Lukisan Kanvas	6010303001	4	Rp 24.400.000
Jumlah			Rp 33.200.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp6,110,531,435)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp6,110,531,435) dan (Rp5,136,653,823).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.054.421.826	4.598.019.720	456.402.106
2	Gedung dan Bangunan	6.585.455.770	1.512.511.715	5.072.944.055
Jumlah		11.639.877.596	6.110.531.435	5.529.346.161

Aset Lain-lain
Rp11,117,500

C.10 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari penghentian penggunaan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat atau tidak terpakai, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11,117,500 sedangkan nilai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23,552,500.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
(Rp11,117,500)

C.11 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp 11,117,500) dan (Rp 23,552,500).

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2,110,300,944

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2,110,300,944 dan Rp3,865,947,756. Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) serta kewajiban lain yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian dari utang tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Jenis	2023
1	Hasil Bersih Lelang	1,140,000
2	Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	21,816,098
3	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	2,072,096,666
4	Lain-lain Lelang	(24,800)
5	BYMHD Listrik	13.795.908
6	BYMHD Telpon	261.072
7	BYMHD Air	1.216.000
Jumlah		2,110,300,944

Ekuitas
Rp7,362,162,065

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,362,162,065 dan Rp7,876,881,691. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp27,650,533,661*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,650,533,661 mengalami penurunan dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp29,579,058,419. Pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Jasa Lainnya	34.798
2	Pendapatan Bea Lelang Pj Lelang Kelas I	24.558.363.260
3	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3.055.911.510
4	Pendapatan Biad Piutang Negara	35.727.678
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerja	12.039
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	35.325
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	449.051
Jumlah Total		27.650.533.661

*Beban Persediaan
Rp60,230,999*

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA Tahun 2023 adalah sebesar Rp60,230,999, turun 0,02% dari TA 2022 sebesar Rp61,250,841. Terjadi pengurangan cukup signifikan disebabkan oleh berkurangnya kegiatan Revaluasi Aset dan Digitalisasi Persuratan melalui Nadine. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan Jasa
Rp1,745,449,490*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,745,449,490 dan Rp1,663,322,161. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban Pemeliharaan
Rp270,073,107*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp270,073,107 dan Rp287,673,338. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pml. Gedung dan Bangunan	80.936.925
2	Beban Pml. Peralatan dan Mesin	189.136.182
Jumlah Total		270.073.107

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp429,519,431*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp429,519,431 dan Rp231,943,337 terjadi kenaikan disebabkan masa tanggap darurat Pandemi Covid dinyatakan sudah selesai sehingga realisasi perjalanan dinas mengalami kenaikan. Selain itu, terdapat dropping penambahan anggaran terkait kegiatan BLBI di luar perjalanan dinas regular pada Triwulan II. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Perjalanan Dinas Biasa	382.704.431
2	Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.815.000
Jumlah Total		429.519.431

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp944,958,354*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp944,958,354 dan Rp360,819,278. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	263.914.276
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	681.044.078
Jumlah Total		944.958.354

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp48,937,496

D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.068.996	
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	2.830.500
3	Pendapatan dari kegiatan non operasional	47.699.000	
4	Beban dari kegiatan non operasional lainnya		
Jumlah Total		48.937.496	

v

Dengan keterangan:

1. Berasal dari penghapusan kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 unit;
2. Berasal dari koreksi KDP Rumah Dinas;
3. Berasal dari dropping barang PSP eks gratifikasi.

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7,876,881,691

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,876,881,691 dan Rp7,544,351,635. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Surplus(defisit) LO
Rp24,249,239,776

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah surplus sebesar Rp24,249,239,776 dan Rp26,981,148,352. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Tahun Berjalan
Rp2,830,500

E.3 Koreksi Nilai Tahun Berjalan

Jumlah Koreksi nilai tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,830,500 dan Rp0. Koreksi tersebut merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan Aset Tetap KDP Rumah Negara yang seharusnya tidak menambah NUP baru.

Transaksi Antar Entitas
(Rp24,766,789,902)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp24,766,789,902) dan (Rp26,648,618,296).

Ekuitas Akhir
Rp7,362,162,065

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,362,162,065 dan Rp7,876,881,691.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1 Pengungkapan Kinerja**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Tangerang II Tahun 2023 adalah sebesar 116,07% dengan rincian sebagaimana terlampir.

F.2 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Keuangan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target-Capaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian	%
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	348,788,000	194,542,180	55,78	Aset	3	4	133,33

Realisasi anggaran pada BLBI diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan nilai Efisiensi pada SMART DJA yang tinggi sehingga realisasi anggaran yang dihasilkan hanya mencapai 55,78%.

F.3 Capaian Output Strategis Lainnya

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian	%
Risalah Lelang UMKM Sukarela (PU)	40,000,000	26,705,000	66.76	Surat Keputusan	20	22	110
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	15,008,000	13,407,300	89.33	Rekomendasi	87	95	109,19

F.4 Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Keuangan

Pada tahun 2023, susunan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkup KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Salbiah	Haryanah
Pejabat Pembuat Komitmen	Salbiah	Bagus Hadi Prawibowo
Pejabat Penandatangan SPM	Endang Sukanda	Ilhamdi Saputra
Bendahara	Citra Nirwana Rousstia	Citra Nirwana Rousstia

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							28,38%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							113,52%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	159,85%	14%	50%	159,85%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131,25%	14%	50%	164,06%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67%	89,17%	14%	20%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(15%)							18,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	139,37%	14%	50%	139,37%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang	P/M	100%	151,81%	14%	50%	151,81%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,10%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							109,92%	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	100,00%	14%	30%	147,06%	120,00%	hijau
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	109,20%	19%	40%	109,20%	109,20%	hijau
3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100,56%	14%	30%	100,56%	100,56%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,94%	14%	100%	196,24%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	P/M	70%	90,61%	14%	30%	129,44%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							108,50%	
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	E/M	94%	99,92%	21%	191%	106,30%	106,30%	hijau
5b-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	E/M	86%	99,92%	21%	191%	116,19%	116,19%	hijau
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	103,03%	11%	16%	103,03%	103,03%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							116,28%	
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	100,00%	14%	20%	116,28%	116,28%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							35,58%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80%	96,43%	14%	100%	120,54%	120,00%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							115,83%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,0%	107,50%	14%	100%	107,50%	107,50%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	131,00%	14%	100%	131,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	E/M	60%	99,48%	21%	150%	165,80%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								116,07%	hijau

Mengetahui,
 Plt. Kepala Kantor

Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Haryanah

Haryanah

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
 No Dokumen : 28-2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Listrik	13.795.908	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		13.795.908

Dibuat Oleh :
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
 No Dokumen : 29-2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Telepon dan Fax	261.072	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		261.072

Dibuat Oleh:
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
 No Dokumen : 30-2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	1.216.000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.216.000

Dibuat Oleh:
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
 No Dokumen : 31-2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1.691.513	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		1.691.513

Dibuat Oleh:
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
 No Dokumen : 32-2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	1.691.513	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		1.691.513

Dibuat Oleh:
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga :
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Banten
Satuan Kerja : KPKNL Tangerang II
No Dokumen : 33-2023
Tanggal : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☒	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	148.395.540	
	K	425782	Pend. Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		148.395.540

Dibuat Oleh:
Ketua SAI

Disetujui Oleh :
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator GLP

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023

Diki Zenal Abidin
Tanggal 31 Desember 2023

Bagus Hadi P.
Tanggal 31 Desember 2023